

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA LETUSAN GUNUNG KELUD

Arik Rianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

Abstrak

Peristiwa bencana letusan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri telah menimbulkan dampak yang cukup luas di beberapa sektor. Penanggulangan yang cepat dan menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat terutama yang menjadi korban bencana. Penanggulangan bencana tersebut sewajarnya di tangani oleh BPBD Kota/Kabupaten terkait. Belum terbentuknya BPBD kota/kab Kediri mengakibatkan penanggulangan bencana di tangani langsung oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

Peran BPBD Provinsi Jatim dalam upaya rehabilitasi mencakup 9 fungsi yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan. Sedangkan upaya dalam bidang rekonstruksi mencakup 3 fungsi yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat serta penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Kata Kunci: Peran, Penanggulangan

Abstract

Catastrophic events eruption of Mount Kelud in Kediri has caused wide impact in some sectors . Rapid and comprehensive countermeasures needed to restore people's lives , especially who are victims of disasters . The disaster management appropriately handled by BPBDs City / County related . Yet the formation BPBDs city / district disaster management Kediri resulted handled directly by BPBDs East Java Province .

BPBDs role in the rehabilitation Jatim province includes 9 function that environmental improvements disaster areas , public facilities and infrastructure repair , home improvement community assistance , psychosocial recovery , health care , reconciliation and conflict resolution , cultural social and economic recovery , restore security and order and the recovery of the functions of government . Whereas the reconstruction efforts in the field includes three functions, namely the rebuilding of infrastructure , social reconstruction and the implementation of proper design and use of better equipment and resilient.

Keywords: Role , Countermeasures

PENDAHULUAN

Gunung Kelud merupakan sebuah gunung berapi di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang masih aktif sampai dengan saat ini. Gunung ini berada di perbatasan antara kabupaten Kediri, Malang, dan Blitar, kira-kira sekitar 27 km sebelah timur pusat kota Kediri. Bersama dengan Gunung Merapi, Gunung Kelud merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia. Sejak tahun 1000 M sampai dengan saat ini, Kelud telah meletus lebih dari 30 kali, dengan letusan terbesar berkekuatan 5 VEI. Tercatat

bahwa erupsi terakhir Gunung Kelud terjadi pada tanggal 13 Februari 2014

Dampak yang ditimbulkan akibat dari letusan Gunung Kelud meliputi berbagai sektor. Tingginya semburan material vulkanik letusan membuat hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami hujan abu. Kediri yang merupakan tempat lokasi Gunung Kelud, mengalami dampak terbesar. Aktivitas ekonomi masyarakat yang menyangkut transaksi jual beli, produksi, pelayanan, dan mobilitas kerja lumpuh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri mencatat sedikitnya sehari tersebut sektor perekonomian

mengalami kerugian 84 miliar rupiah. Abu vulkanik juga berdampak buruk bagi kesehatan. Partikel abu vulkanik berpotensi mengganggu sistem pernapasan karena mengandung kristal silika. Kristal silika diketahui merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam industri kaca untuk membuat kaca keras, jika terhirup dan masuk kedalam paru-paru, partikel ini berpotensi merusak alveoli, unit pernapasan terkecil dari paru-paru.

Penanggulangan bencana secara khusus ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hal ini dikarenakan BPBD merupakan unsure pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan sebagai unsure pelaksana penyelenggara penanggulangan bencana yang ada di daerah. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja lembaga BPBD diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Penguatan kelembagaan BPBD sebagaimana amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didalam pasal 18 ayat 1 bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk BPBD sampai pada tingkat kota atau kabupaten. Pada saat ini dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur, telah terbentuk lembaga BPBD di 29 Kab/Kota di Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut : Dari 29 BPBD yang terbentuk, terdapat 2 BPBD yang belum terisi Pejabat definitif yaitu Kabupaten Pamekasan dan Banyuwangi. Dari 9 Kabupaten atau Kota yang belum terbentuk BPBD, terdapat 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Tuban, Magetan dan Kediri yang saat ini sedang membahas Raperda pembentukan BPBD dengan Pihak Legislatif. Selanjutnya terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang sampai saat ini belum membentuk BPBD, yaitu Kabupaten Jember, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Surabaya.

Pembentukan BPBD Provinsi Jawa Timur berangkat dari Kebijakan Program Prioritas Nasional dan Regional 2009-2014, searah dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk lembaga BPBD, yang memiliki tupoksi dalam penanganan penanggulangan bencana, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD telah memenuhi amanah dimaksud melalui Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur dan Perda No. 2/2009 tentang organisasi, tata kerja lembaga lain.

Peristiwa Bencana Letusan Gunung Kelud pada tanggal 13 Februari 2014 terjadi pada saat belum terbentuknya BPBD kota/Kabupaten Kediri. Tanggung jawab penanggulangan pasca bencana otomatis diserahkan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur. hal ini mengharuskan BPBD menjadikan bencana letusan gunung kelud menjadi

sebuah prioritas, kelangsungan kehidupan masyarakat yang terkena bencana juga harus segera diprioritaskan. Penanggulangan Pasca Bencana letusan Gunung Kelud berdasar pada Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memiliki minat untuk melihat sejauh mana peran BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan pasca bencana letusan Gunung Kelud.

METODE

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengamati dan mendeskripsikan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana letusan Gunung Kelud. Peran tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dalam kegiatan penelitian yaitu Badan Penggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan BPBD Provinsi Jawa Timur merupakan suatu Badan yang secara khusus berfungsi melakukan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasi kedua dalam penelitian ini adalah Daerah sekitar Gunung Kelud yang menjadi korban bencana untuk menggali data kegiatan yang telah berlangsung di lokasi tersebut yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk Penanggulangan pasca bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang diakibatkan oleh letusan Gunung Kelud. Adapun dalam penelitian ini fokus penelitian akan di khususkan pada kegiatan penanggulangan pasca bencana yaang didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi

Jawa Timur, Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Timur serta masyarakat sekitar Gunung Kelud yang menjadi korban bencana dan sasaran kegiatan penanggulangan pasca bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Timur

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Peneliti telah melakukan wawancara dengan seluruh informan yang sudah ditargetkan sebelumnya, yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Bidang Rehabilitasi, Kepala Bidang Rekonstruksi, dan masyarakat desa sekitar lokasi Gunung Kelud.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti, untuk mendapatkan data yang mendukung, dimana hal ini sangat berkaitan dengan gambaran umum pada pelaksanaan kegiatan penanggulangan BPBD Provinsi Jawa Timur. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, dan dokumen yang dimaksud berupa dokumen profil BPBD serta foto/gambar yang relevan terhadap penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penggunaan alat bantu instrument dalam proses pengumpulan data juga berupa

kamera, tape recorder dan lembar catatan atau pedoman wawancara sebagai panduan peneliti dalam mencari data dari subjek penelitian secara lengkap.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

terdapat empat tahap analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data ini diperoleh setelah melakukan pengamatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim dan mengajukan wawancara kepada para informan.

2. Reduksi data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis memilah-milah data yang telah didapat dengan topik yang akan dibahas.

3. Penyajian data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan, matriks, networks, chart, atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan

cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sebelum terbentuk BNPB dan BPBD, Satuan Kerja yang bertanggung jawab akan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana adalah Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB), akan tetapi setelah terbentuk BNPB Bakornas PB dibubarkan.

Implikasi dari pembubaran Bakornas PB adalah pembubaran pada rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB). BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat menteri dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana yang berada pada tingkat pusat atau nasional, sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah dan merupakan lembaga yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BPBD pada tingkat provinsi dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau setingkat eselon Ib dan di tingkat Kabupaten/Kota, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon IIa. Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah.

2. Peran BPBD dalam Penanggulangan Pasca Bencana

Peran BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan pasca bencana tidak terlepas dari tugas dan fungsi BPBD sebagai lembaga bentukan pemerintah yang secara khusus menangani penanggulangan bencana. Peran dalam penanggulangan ini termaktub dalam rencana kerja BPBD tahun 2014, yang diturunkan dari tugas dan fungsi umum BPBD itu sendiri

Peran BPBD dalam penanggulangan pasca bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana

Peran BPBD dalam perbaikan lingkungan daerah bencana dirasa sangat diperlukan dalam mengembalikan keadaan lingkungan fisik akibat bencana. Menurut Ramli (2010:27) Perbaikan Lingkungan daerah bencana adalah perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

2. Perbaikan sarana dan prasarana umum

Perbaikan sarana dan prasarana umum memerlukan perhatian yang penting karena menyangkut kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Setiap program Rehabilitasi yang mengenai perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan secara cepat sesuai dengan prioritas dan sumber daya yang ada. Persyaratan teknis prasarana dan sarana umum yang dibangun harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen prasarana dan sarana tersebut.

3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

Rumah atau rumah tinggal merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penghunian warga masyarakat selama lebih dari satu putaran musim. Secara fisik rumah terdiri atas komponen bangunan gedung, pekarangan atau tanah tempat berdirinya, dan utilitasnya. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat mencakup segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, meliputi: dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia

4. Pemulihan sosial Psikologis

Yang dimaksud pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Kegiatan ini menitik beratkan pada aspek psikososial yaitu kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih.

5. Pelayanan kesehatan

Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi

seperti sebelum terjadi bencana. Upaya ini memfokuskan kegiatan pada pemulihan sistem pelayanan kesehatan, yang berlangsung setelah dilakukan analisis dampak bencana terhadap pelayanan kesehatan. Penyusunan rencana pemulihan sistem pelayanan kesehatan dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dan dibantu oleh lembaga/dinas/instansi yang relevan baik swasta maupun milik pemerintah. Menurut wawancara dari Bapak Drs. Palal Budi Santoso, M.Si menyatakan

6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik

Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Dalam pedoman pelaksanaan Rehabilitasi oleh BPBD disebutkan bahwa setiap kegiatan rekonsiliasi dan resolusi harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi konflik

7. Pemulihan sosial ekonomi budaya

Menurut Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana. Lebih lanjut disebutkan kegiatan dan lembaga sosial adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan sosial yang berpola maupun tidak yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di daerah bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana.

8. Pemulihan keamanan dan ketertiban

Pemulihan keamanan dan ketertiban adalah mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana. Keamanan adalah suatu kondisi dimana anggota masyarakat merasa aman. Ketertiban adalah suatu kondisi dimana anggota masyarakat melakukan kegiatan dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud meliputi ketentuan hukum positif atau adat kebiasaan. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar

kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan terbebas dari rasa tidak aman dan tidak tertib.

9. Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan adalah fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah. Pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintahan pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Petugas pemerintahan adalah orang yang karena kemampuannya diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembangunan wilayah.

9. Pembangunan kembali sarana dan prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan oleh institusi/lembaga terkait, di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana, bersama-sama dengan masyarakat. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang diperbaharui yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa datang.

10. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

Proses pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, bersama-sama dengan masyarakat melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan. Penyusunan Rencana Teknis dilakukan melalui survei investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan. Perencanaan teknis yang disusun harus memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan; dan arahan pemanfaatan ruang. Perencanaan teknis meliputi rencana rinci pembangunan sarana, dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran, rencana kerja, dokumen kerjasama dengan pihak lain dan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

11.. Penerapan Rancang Bangun yang Tepat dan Penggunaan Peralatan yang Lebih Baik dan Tahan Bencana

Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, melalui cara Memperhatikan peraturan bangunan (building code), peraturan perencanaan (design code), pedoman dan manual rancang bangun yang ada, Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan; Menyesuaikan

dengan tata ruang; Memperhatikan kondisi & kerusakan daerah; Memperhatikan kearifan lokal; dan Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan

B. Pembahasan

Setelah data terkumpul dan telah dianalisis maka selanjutnya adalah pembahasan dari hasil penelitian. Pembahasan dalam hal ini mencakup beberapa hal tentang Penanggulangan Pasca Bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Salah satu tindakan penanggulangan pasca bencana adalah rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana (Nurjanah dkk, 2012:40). Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat dan budaya.

Menurut Perka BNPB No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, kegiatan rehabilitasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur umum yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sosialisasi dan Koordinasi Program

Koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat Desa/Kelurahan. Sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban. Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan.

2. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian

Inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan/kerugian bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD dan/atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD. Verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi kerusakan/ kerugian dapat dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD oleh karena adanya usulan, masukan, sanggahan dari masyarakat maupun karena timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan. Inventarisasi, identifikasi kerusakan/kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan “rapid assessment” tahap tanggap darurat dan atau rehabilitasi.

3. Perencanaan dan Penetapan Prioritas

Perencanaan dan penetapan prioritas di tingkat masyarakat yang dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat merupakan masukan penting bagi program rehabilitasi. Sinkronisasi rencana dan program meliputi sinkronisasi

program tahapan rehabilitasi, prabencana, tanggap darurat dan rekonstruksi, sinkronisasi lintas-pelaku, sinkronisasi lintas-sektor, sinkronisasi lintas-wilayah. Perencanaan, penetapan prioritas dan sinkronisasi program dilakukan oleh BPBD dan/atau BNPB.

4. Mobilisasi Sumberdaya

Mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai ketrampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rehabilitasi pascabencana. Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi.

5. Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses dan kegiatan rehabilitasi. Pelaksanaan pemantauan kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga/institusi perencanaan di tingkat nasional dan/atau daerah, sebagai bahan menyeluruh dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Penyusunan laporan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD. Laporan penyelenggaraan rehabilitasi selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

PENUTUP

Simpulan

Peran BPBD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan pasca bencana yang mencakup kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat berperan penting dalam proses penanggulangan pasca bencana masyarakat korban bencana letusan Gunung Kelud. Adapun Peran BPBD dalam hal rehabilitasi menyangkut 10 program kegiatan dan dalam hal Rekonstruksi meliputi 4 kegiatan utama yang telah dilakukan dengan baik oleh BPBD Provinsi Jawa Timur
2. BPBD provinsi Jawa timur dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana bekerja sama dengan pihak terkait yang memiliki tujuan yang sama agar tercapai indikator keberhasilan suatu program
3. Terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa dikatakan berhasil karena tidak tercapainya indikator keberhasilan program yang telah tercantum dalam rencana kerja BPBD.

Saran

1. BPBD Provinsi Jawa Timur Diharapkan Lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan penanggulangan bencana
2. Memaksimalkan peran BPBD di bidang Penanggulangan bencana
3. Guna mengatasi beberapa program yang belum mencapai keberhasilan, BPBD hendaknya berkonsolidasi dengan BNPB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil BNPB di daerah
4. Masyarakat korban bencana harus lebih bisa diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, khususnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Saebani Ahmad, Beni. 2012. Metodologi Kualitatif. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardalis, Drs. 2006. Metode Penelitian. Bandung: Bumi Aksara
- Miles MB dan Hubberman AM. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohid dan Mulyarto. Jakarta: UI Percetakan
- Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana. Yogyakarta. Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management). Jakarta: Dian Rakyat
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur

Perda No. 2 Tahun 2009 tentang organisasi, tata kerja lembaga lain Provinsi Jawa Timur

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

<http://bpbj.jatimprov.go.id/>

<http://bnpb.go.id/>

<http://www.kedirikab.go.id/>